



Nama Formulir:

**Lembar  
Pengesahan  
Karya Ilmiah**

No.

FR-003/PR-003/KB-02-  
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Emil Radhiansyah, M.Si  
Jabatan Dosen  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
NIP 211120239

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Peningkatan Investasi Tiongkok Terhadap Indonesia Melalui Skema Integrasi Multilateral dan Pengaruh Nilai Ekspor

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Richard Angelo Nataniel Taulu  
Jenjang S1  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
NIM 118105036

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 22 Juli 2022

Penelaah, a-n

Emil Radhiansyah, M.Si  
NIP: 211120239

Nama Formulir:

No.

FR-002/PR-003/KB-02-  
01/MMP/UPM/2020

**Surat Pernyataan  
dan Validasi**

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Richard Angelo Nataniel Taulu  
Jenjang S1  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
NIM 118105036  
Alamat Jl. Puspa No. 15 Komplek AL, Kota Depok

\* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:  
Peningkatan Investasi Tiongkok Terhadap Indonesia Melalui Skema Integrasi Multilateral  
dan Pengaruh Nilai Ekspor

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 22 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,



Richard Angelo Nataniel Taulu  
NIM : 118105036

# **Peningkatan Investasi Tiongkok Terhadap Indonesia Melalui Skema Integrasi Multilateral dan Pengaruh Nilai Ekspor**

Richard Angelo Nathaniel Taulu  
118105036

## **Abstrak:**

Investasi asing masih menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia selain menggunakan APBN. Kebijakan luar negeri Indonesia ditentukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang membuat keputusan terkait arah kebijakan tersebut. Dalam rangka mendapatkan investasi, terdapat peran Presiden Joko Widodo dalam upaya mempromosikan dan mendapatkan investasi itu. Tiongkok merupakan salah satu mitra strategis Indonesia perihal kerjasama ekonomi, khususnya realisasi investasi dan nilai ekspor antara Indonesia dengan Tiongkok. Kerjasama ekonomi diantara kedua negara tersebut dapat ditempuh melalui beberapa cara seperti pertemuan bilateral dan forum multilateral.

Kata Kunci: Investasi, Presiden, Tiongkok, Ekspor.

## **Pendahuluan:**

Presiden Joko Widodo kerap kali menitikberatkan pentingnya Investasi selama menjalankan pemerintahan Indonesia. Pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2017 yang diselenggarakan di Jakarta, saat sesi pembukaan acara tersebut ia memberikan pidato mengenai bahwa di Indonesia investasi adalah salah satu sumber dana bagi pembangunan nasional selain penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada pembangunan infrastruktur untuk menopang aktivitas perekonomian. Hal tersebut karena APBN hanya sanggup untuk menyediakan sekitar 30% dari total sumber dana yang dibutuhkan, maka ia menuturkan bahwa investasi lah jalan lain untuk upaya pemenuhan modal tersebut (BPKP, 2017).

Pada awal dirinya menjadi Presiden di tahun 2014 ia kerap kali memberikan pernyataan atau sikap yang memperlihatkan bahwa Indonesia harus mengupayakan FDI, contohnya pada saat rapat terbatas dengan kabinet kementerian nya ia meminta agar seluruh kementerian menciptakan kebijakan atau regulasi yang mempermudah masuknya investasi asing ke dalam negeri. Kemudahan pada mekanisme akan mempengaruhi sektor ril dan berdampak nyata dalam menunjang perekonomian nasional (Sunardi, 2015). Begitu juga pada saat dirinya baru menjabat sebagai Presiden untuk kedua kalinya pada periode kedua, ia masih memberikan

pernyataan bahwa keberadaan investasi asing masih memiliki perhatian khusus. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 Presiden Joko Widodo kembali memberikan pernyataan bahwa satu-satunya langkah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi, khususnya investasi asing (Adyatama, 2020).

Investasi sendiri adalah suatu kegiatan dalam aktivitas perekonomian dimana satu subjek memberikan modal dan menginvestasikan modal tersebut ke subjek lain dalam rangka mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Menurut OECD Investasi dilakukan oleh dua subjek yang membedakan jenisnya, yaitu investor domestik yang melakukan investasi di negaranya sendiri dan investor asing yang melakukan investasi di negara lain. Investasi juga membuat suatu nilai positif yaitu mempengaruhi standar hidup masyarakat dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan surplus keuangan nasional dalam menunjang perekonomian (OECD, 1996). Di Indonesia keberadaan Investasi dibagi menjadi dua jenis yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dapat disebut *Foreign Direct Investment* (FDI). Sedangkan untuk regulasi yang mengatur investasi asing melalui UU No. 1 Tahun 1967 yang diperbaharui di UU No. 25 Tahun 2007, dimana FDI dapat berbentuk berupa modal atau dana, pembelian saham perusahaan Indonesia, atau pendirian perusahaan gabungan.

Menurut Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, pemenuhan kebutuhan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, khususnya untuk pengembangan infrastruktur sebagai penopang keberlangsungan aktivitas perekonomian Indonesia. Joko Widodo berpendapat bahwa salah satu upaya pemenuhan modal tersebut dapat melalui investasi asing (Akbar & Rahmat, 2017). Maka upaya-upaya kebijakan luar negeri untuk mendapatkan investasi perlu dilakukan Indonesia untuk menunjang kebutuhan modal pembangunan nasional selain menggunakan APBN.

Pasca mengalami normalisasi hubungan dengan Tiongkok, Indonesia kerap kali melakukan banyak kerjasama sebagai upaya peningkatan hubungan kedua negara. Hubungan bilateral dengan Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat intens hingga dari waktu ke waktu terjalin banyaknya kesepakatan dan kerjasama dengan negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui sejarah panjang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Rangkuman yang dibuat Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara RI (2015) memperlihatkan Indonesia mulai kembali melakukan pertemuan diplomatik dan kerjasama antar negara dengan Tiongkok pasca penandatanganan kesepakatan pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 1990. Pada tahun yang sama Presiden Soeharto melakukan kunjungan

bilateral ke Tiongkok untuk mengawal penandatanganan sebuah kesepakatan atas terbentuknya komisi bersama bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknik. Tren positif tersebut dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat awal ia dilantik menjadi Presiden ia memilih Tiongkok sebagai negara pertama dalam kunjungan luar negerinya. Pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok mengenai bantuan kredit dan keuangan serta kerjasama perdagangan dan pariwisata. Sama dengan kepemimpinan sebelumnya, Presiden Megawati juga mengawal dalam peningkatan kerjasama antar kedua negara dengan membentuk forum energi sebagai payung investasi yang dimiliki Tiongkok untuk melakukan investasi di Indonesia. Hingga pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, kerjasama Indonesia dengan Tiongkok tertuang pada dua perjanjian esensial yaitu kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok yang ditandatangani pada tahun 2005 dan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok pada tahun 2013.

Pada saat Presiden Joko Widodo memimpin, kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok meliputi sektor-sektor strategis seperti politik, keamanan, dan juga ekonomi. Menurut Putri & Ma'arif (2019) kerjasama kedua negara di sektor ekonomi terlihat keterkaitan dan memiliki daya tarik sendiri diantara Indonesia dengan Tiongkok, khususnya perihal perdagangan, investasi, ekspor dan impor, hingga pariwisata. Selain itu Indonesia merupakan mitra dagang strategis bagi Tiongkok melalui kebutuhan impor pada komoditas kakao, karet, besi, produk kimia, hingga minyak dan gas. Indonesia juga mendukung salah satu gagasan kebijakan luar negeri Tiongkok yaitu *One Belt One Road* (OBOR) yang merupakan kebijakan Tiongkok perihal jalur perdagangan antarbenua atau sering disebut jalur sutera adalah jalur perdagangan yang dapat menghubungkan Tiongkok dengan kawasan Eropa, Asia, hingga Afrika. Selain sejalan dengan gagasan Poros Maritim Dunia yang sempat diprakarsai Presiden Joko Widodo di awal kepemimpinannya, dukungan terhadap proyek OBOR juga dapat membantu Indonesia dalam memaksimalkan ekspor komoditas-komoditas Indonesia ke Tiongkok. Melalui gagasan tersebut, Indonesia juga dapat memanfaatkan kemitraan strategis dengan negara-negara yang dilalui jalur sutera Tiongkok dari negara-negara anggota ASEAN hingga Eropa Barat.

Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun Presiden kerap memilih hubungan dan kerjasama bilateral, pertemuan-pertemuan multilateral masih menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia (Irewati & Kartini, 2019). Rizal Sukma selaku Direktur Eksekutif CSIS menuturkan bahwa kebijakan luar negeri dibawah Presiden Joko Widodo akan lebih fokus mengembangkan hubungan bilateral, berbeda dengan Presiden sebelumnya. Namun menurutnya meskipun Presiden Joko Widodo lebih berorientasi dalam melakukan aktivitas dan kegiatan diplomatik dengan negara-negara melalui bilateral,

namun konsep multilateral masih memiliki keterkaitan khusus dan penting bagi Indonesia melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya (Parameswaran, 2014).

Pada agenda *Belt and Road Summit* ke 5, Presiden Joko Widodo yang hadir sebagai salah satu pembicara utama mengungkapkan bahwa kerjasama multilateral memiliki relevansi dengan peningkatan daya saing Indonesia dalam perihal investasi asing (Kemlu, 2020). Pada konsep multilateral keterlibatan negara-negara anggota dalam melihat suatu permasalahan kerap kali mengindikasikan perbedaan pendapat karena terdapatnya perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota, namun dengan mengupayakan kerjasama dengan kesepakatan bersama dan menjunjung nilai-nilai kolektif akan berdampak positif secara langsung. Selain itu forum multilateral akan menjadi wadah bersama untuk menjadi sarana penghubung untuk menampung ide-ide dan langkah bersama dalam menangani isu tertentu. Meskipun pada akhirnya terjadi kesepakatan lain di luar agenda utama forum multilateral tersebut antar negara anggota, namun multilateral dapat dilihat sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan tersebut.

### **Tinjauan empiris:**

Jika FDI penting di suatu negara, maka tentunya terdapat langkah atau cara untuk mendapatkan FDI itu sendiri. Terdapat langkah-langkah dari pemerintah di suatu negara dalam upaya mendapatkan FDI seperti kebijakan, sikap dan aktivitas di ranah politik internasional, maupun hubungan diplomasi dengan negara lain. Pada akhirnya masing-masing dari negara tersebut secara tidak sadar menciptakan sebuah kompetisi untuk mendapatkan FDI, kompetisi itu justru melahirkan standar yang baik bagi negara itu sendiri. Standar tersebut dimaknai bahwa setiap negara akan terus berbenah pada perilaku atau instrumen yang mendukung dan mempermudah investasi asing masuk, maka dengan hadirnya standar pada negara-negara yang mencari FDI para investor asing semakin tertarik dengan meningkatnya standar dan kualitas dari negara tersebut. Tentunya karena sifat pragmatis investor yang lebih mengedepankan nilai profitabilitas di setiap investasinya (Coughlin dkk., 1991).

Dalam pembahasan promosi FDI dan kompetisi kebijakannya, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengeluarkan variabel-variabel yang mempengaruhi promosi FDI seperti pemberian insentif, standar lingkungan, kebijakan buruh, privatisasi, dan integrasi multilateral atau regional (Oman, 2000). Integrasi multilateral atau regional merupakan variabel yang relevan dengan *Foreign Direct Investment* karena terdapat peran interaksi suatu negara dalam politik internasional, atau diplomasi bilateral dan multilateral dalam upaya pemerintah suatu negara pada kompetisi promosi FDI lewat

kebijakan-kebijakan yang dibentuk dan dapat mempengaruhi keberadaan atau masuknya FDI itu sendiri. Integrasi multilateral sendiri merupakan suatu forum yang membahas suatu permasalahan tertentu antara satu negara atau lebih yang memiliki tujuan kolektif antar negara anggota.

Brendan Taylor (2013) sepakat bahwa forum multilateral dapat memfasilitasi pertemuan bilateral. Melalui konsep *the bilateral–multilateral approach* memperlihatkan bahwa terdapat konektivitas dan sinergi antara kerjasama multilateral dengan bilateral melalui pemahaman bahwa langkah untuk memperdalam kerjasama bilateral dapat ditempuh melalui jalur multilateral. Salah satu contohnya adalah pertemuan Dialog Shangri-La yang diselenggarakan oleh *International Institute for Strategic Studies* (IISS). Pertemuan tersebut dapat mempertemukan banyaknya delegasi internasional dalam waktu dan jadwal yang singkat, dari pertemuan tersebut para delegasi memiliki keleluasaan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi lainnya selama pertemuan tersebut berlangsung namun di luar waktu dan agenda utama. Hal tersebut membuat banyaknya pertemuan bilateral disela-sela agenda utama berlangsung. Contoh lain melalui krisis nuklir Korea Utara. Forum multilateral *The Six Party Talks* dapat dilihat sebagai sarana untuk memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Disela-sela pertemuan tersebut pihak Amerika mengadakan pertemuan bilateral dengan Korea Utara guna membahas permasalahan terkait. Pertemuan tersebut diindikasikan sebagai alternatif dari sikap kedua negara yang memberikan pernyataan dengan tidak ingin berkomunikasi antar keduanya yang diungkapkan sebelum pertemuan ini berlangsung.

Perkembangan integrasi multilateral sebagai rekonstruksi ekonomi yang berfokus pada kegiatan perdagangan multilateral tak lepas dari peran suatu negara dalam upaya untuk promosi dan menarik FDI, termasuk bagi negara-negara berkembang. Salah satunya adalah *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dalam perjanjian *Canada-US Free Trade Agreement* tahun 1988 yang dalam kebijakannya lebih dominan dalam mempromosikan FDI daripada implikasi utamanya dalam perdagangan, hal tersebut juga turut membuat Meksiko berkeinginan bernegosiasi dengan NAFTA pada tahun 1990 untuk hal yang sama sebagai upaya meningkatkan promosi FDI. Pengumuman Meksiko tersebut secara substansial mempengaruhi naiknya FDI di Meksiko selain implikasi dari kebijakan perdagangan itu sendiri (Oman, 2000, p. 104).

Contoh lain integrasi multilateral terhadap FDI adalah pada masa terbentuknya *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1957 dan perubahan yang terjadi di tahun 1986 pada pasar tunggal melalui *Single European Act*. Integrasi tersebut lebih kental mengandung unsur politik di tengah kondisi fluktuatif dinamika politik kawasan eropa sebagai

motif utama, namun hal tersebut memberikan dampak yang besar bagi FDI. Efek dari integrasi tersebut berdampak pada masif nya pertumbuhan FDI bagi negara anggota yang berasal dari sesama anggota ataupun berasal dari luar termasuk kawasan lain (Cubel & Sanchis, 2003).

Menurut Bartels (2009) meskipun pada akhirnya motif tujuan multilateral beragam meliputi aspek politik, sosial, dan ekonomi, namun hal tersebut terindikasi sebagai daya tarik utama dari FDI. Pembentukan forum tersebut dapat menjadi instrumen atau variabel yang kuat dalam promosi FDI karena daya tarik pasar yang lebih besar telah diciptakan dan semakin menghubungkan lebih banyak negara satu dengan lainnya. Hal tersebut seakan memfasilitasi masuknya FDI di antara negara anggota ataupun negara di luar kawasan. Dengan demikian kesepakatan multilateral tidak hanya mendorong lebih banyak investasi antar anggota tetapi juga FDI dari luar. Selain itu forum multilateral mengumpulkan beberapa negara secara bersama, pada akhirnya terbuka ruang-ruang pertemuan lain antar negara anggota untuk mencapai kesepakatan lain diluar forum multilateral tersebut.

Melalui analisis Najih (2019) nilai ekspor suatu negara berkaitan dengan peningkatan penerimaan FDI. Investor yang melakukan investasi di suatu negara atau kawasan secara umum karena wilayah tersebut mempunyai pasar ekspor yang besar dan luas, atas hal tersebut membuat semakin banyaknya investor asing yang ingin berinvestasi pada wilayah tersebut. Hal itu terjadi karena ekspor bisa dijadikan sebuah acuan dan pendorong perusahaan, pengusaha, dan investor luar negeri untuk berinvestasi. Selain itu investor asing akan yakin menginvestasikan dana nya terhadap negara yang berpengalaman dibidang ekspor, terutama jika sebelumnya sudah terjalin hubungan ekspor antara negara pemberi dan penerima FDI.

### **Metode Penelitian:**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode melihat perilaku subjek yang diamati dan akan memberikan data deskriptif dalam bentuk tulisan. Selain itu pada pengumpulan data menggunakan data sekunder perihal investasi Indonesia melalui Tiongkok, nilai ekspor Indonesia dan Tiongkok, hingga pertemuan-pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder pada kurun waktu 2018 hingga 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia.



## **Hasil Penelitian:**

Negara-negara di dunia tentu memiliki sebuah kebijakan luar negeri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, salah satu yang menentukan hal itu adalah pemimpin negara tersebut. Hal itu dapat dibuktikan melalui pendapat John T. Rourke (1986) bahwa terdapat tiga determinan dalam terbentuknya kebijakan luar negeri suatu negara yaitu individu, negara, dan sistem internasional. Pemimpin negara memang dikaitkan sebagai aktor penentu dalam terciptanya suatu kebijakan luar negeri yang diambil negara melalui determinan individu, hal itu terjadi karena kerangka pemikiran dan sudut pandang individu tersebut melatarbelakangi terciptanya kebijakan yang diciptakan. Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 tentu memiliki kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya para Presiden pada periode-periode sebelum dirinya. Sebelum Joko Widodo menjadi seorang Presiden atau jauh masuk ke dunia politik dirinya adalah seorang pengusaha, latar belakang tersebut mempengaruhi kerangka berpikir dan sudut pandang Joko Widodo terhadap pengambilan kebijakan untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Atas dasar latar belakang tersebut menurut Irewati & Kartini (2019) dalam melihat kerjasama Indonesia dengan negara lain, Joko Widodo lebih tertarik untuk melakukan kerjasama bilateral dibanding forum multilateral. Hal itu terjadi karena Presiden Joko Widodo memiliki pemikiran bahwa kerjasama Indonesia harus bersifat pasti dan menguntungkan. Meskipun dirinya lebih menyukai kerjasama bilateral, Presiden Joko Widodo tetap melaksanakan dan hadir pada agenda-agenda forum multilateral yang diikuti Indonesia. Kehadiran Presiden Joko Widodo pada forum multilateral tersebut dapat membantu Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral disela-sela pertemuan multilateral itu dilaksanakan.

Di tahun 2018 Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping disela-sela berlangsungnya pertemuan multilateral Konferensi Tingkat Tinggi (APEC) di Papua Nugini. APEC sendiri adalah kerjasama atau forum multilateral antara 21 negara yang berada pada wilayah pasifik dan mempunyai tujuan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia-Pasifik. Pertemuan ini dilaksanakan sekali setiap tahun dan mempertemukan seluruh kepala pemerintahan negara anggota. Pada KTT APEC tahun 2018, Indonesia melakukan pertemuan bilateral di waktu dan tempat yang sama pada saat KTT tersebut berlangsung tepatnya di Port Moresby, Papua Nugini. Di pertemuan itu Presiden Joko Widodo memanfaatkan kesempatan untuk membawa topik pembahasan pada meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Seperti mendorong investasi Tiongkok ke Indonesia untuk ditingkatkan, permasalahan defisit perdagangan, hingga mengawal kebijakan ekspor Indonesia

terhadap komoditas-komoditas tertentu seperti buah tropis, minyak dan gas, serta besi (Setkab, 2018).

Sedangkan pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo kembali memanfaatkan forum multilateral untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping melalui KTT G20 yang dilaksanakan di Jepang. G20 sendiri merupakan kerjasama atau forum multilateral antara 19 negara dengan 1 kawasan yaitu Uni Eropa, forum yang dahulu hanya membahas terkait kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan stabilitas keuangan global telah bertransformasi menjadi forum yang membahas beberapa sektor penting seperti ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Hal tersebut karena forum tersebut mewakili 60% dari populasi dunia, 75% nilai perdagangan dunia, hingga 80% total PDB dunia (Setkab, 2019). Memanfaatkan forum multilateral tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping disela-sela pertemuan KTT G20 itu berlangsung dan dilaksanakan ditempat yang sama yaitu di Osaka, Jepang. Pertemuan dengan Xi Jinping kembali dimanfaatkan Joko Widodo untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, salah satunya perihal investasi dan ekspor. Joko Widodo meminta Xi Jinping untuk mendorong perusahaan, pengusaha, dan para investor untuk menanamkan modal nya di Indonesia atau bekerja sama untuk pembangunan suatu proyek infrastruktur. Selain itu pada pertemuan tersebut Joko Widodo membahas perihal crude palm oil (CPO) yang di ekspor Indonesia ke Tiongkok, salah satunya pembahasan total ekspor yang sudah mencapai 1 juta ton (Ihsanuddin, 2019).

Di tahun 2020 pandemi Covid19 mempengaruhi terlaksana nya pertemuan-pertemuan multilateral maupun bilateral bagi seluruh negara di dunia. Sebagai pencegahan terjadinya penyebaran virus tersebut, banyak pertemuan-pertemuan antar kepala negara yang harus dibatalkan atau dilakukan via daring. Hal tersebut berdampak dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping, Sekretariat Kabinet melaporkan bahwa di tahun 2020 hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping dilakukan melalui sambungan telepon dan daring, tidak dilakukan secara multilateral maupun bilateral diantara keduanya. Namun pertemuan antara Indonesia dan Tiongkok didelegasikan kepada Menteri-menteri diantara kedua negara tersebut, salah satunya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan kunjungan bilateral ke Tiongkok (Setkab, 2020). Namun, pandemi Covid19 tidak menjadi permasalahan dengan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Untuk nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok sendiri mencapai 23 miliar USD untuk periode Januari-Agustus dengan kenaikan sekitar 6,4%. Perlu diketahui bahwa periode tersebut merupakan kurun waktu dimana pandemi Covid19 mengalami eskalasi pada penyebaran diseluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Tiongkok.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa kinerja dari ekspor Indonesia ke Tiongkok masih memiliki tren positif tanpa terpengaruh penurunan ekonomi global terdampak Covid19. Nilai tersebut merupakan nilai ekspor tertinggi yang dilakukan Indonesia jika melihatnya berdasarkan negara. Adapun komoditas utama dari ekspor Indonesia ke Tiongkok meliputi CPO, nikel, batu bara, bahan kimia, baja dan besi yang telah terproduksi, dan komoditas lain.

Tahun	Penerimaan FDI Indonesia oleh Tiongkok	
	Proyek	Realisasi
2018	1562	2,3 miliar USD
2019	2130	4,7 miliar USD
2020	3027	4,8 miliar USD

**Tabel 1.1 Penerimaan FDI Indonesia Oleh Tiongkok Berdasarkan Tahun**

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Badan Pusat Statistik

Penerimaan FDI Indonesia melalui Tiongkok terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020. Dengan nilai realisasi investasi tersebut Tiongkok masuk kedalam peringkat lima negara tertinggi dalam pemberian FDI Indonesia berdasarkan negara. Di tahun 2018 nilai realisasi investasi Indonesia oleh Tiongkok berjumlah 2,3 miliar USD, kemudian pada akhir 2020 nilai tersebut mengalami eskalasi menjadi 4,8 miliar USD. Berbanding lurus dengan nilai realisasi investasi, jumlah total proyek investasi yang dikerjakan oleh Tiongkok terkait keberlangsungan FDI ke Indonesia turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Indonesia hanya memiliki 1562 total proyek investasi yang diberikan oleh Tiongkok, sedangkan dua tahun kemudian di tahun 2020 terdapat peningkatan dua kali lipat menjadi 3027 proyek investasi. Diplomasi ekonomi Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan bilateral disela-sela pertemuan multilateral dan naiknya nilai ekspor mempengaruhi naiknya nilai realisasi investasi dan total proyek investasi yang dimiliki Indonesia melalui Tiongkok.

Jika melihat peningkatan penerimaan FDI Indonesia melalui Tiongkok berdasarkan skema integrasi multilateral, maka konsep Brandon Taylor terkait multilateral sebagai fasilitator terciptanya kesepakatan bilateral semakin relevan. Presiden Joko Widodo memanfaatkan pertemuan KTT APEC dan G20 sebagai upaya pelaksanaan pertemuan bilateral dengan Tiongkok, terbukti pertemuan itu dilaksanakan pada lokasi tempat dan kurun waktu yang sama dengan pelaksanaan kedua forum multilateral tersebut. Pada pertemuan itu juga Presiden Joko Widodo mempromosikan peningkatan investasi dan meminta pemerintah Tiongkok untuk

mendorong para investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Atas pertemuan tersebut Joko Widodo memperlihatkan bahwa pola interaksi dan hubungan Indonesia dengan negara lain melalui diplomasi ekonomi memiliki kaitan dengan meningkatnya FDI, khususnya di Indonesia.



**Tabel 1.2 Nilai Ekspor Indonesia Ke Tiongkok Berdasarkan Tahun**

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Badan Pusat Statistik

Nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok selalu menanjak dan mengalami tren positif dari tahun 2018 hingga 2020. Bahkan ketika terjadinya pandemi yang mengakibatkan terhambatnya perekonomian global tidak mempengaruhi nilai ekspor antara kedua negara tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terkait komoditas ekspor Indonesia terhadap permintaan Tiongkok menunjukkan naiknya nilai ekspor tersebut, namun hal tersebut tak lepas dari peran diplomasi ekonomi Presiden Joko Widodo melalui pertemuan-pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dengan pembahasan kerjasama ekonomi kedua negara, khususnya perihal investasi dan ekspor.

Maka sesuai dengan analisis Najih (2019), nilai ekspor suatu negara berkaitan dengan peningkatan penerimaan FDI oleh negara tersebut. Indonesia melakukan ekspor ke Tiongkok karena pasar yang besar dan luas dimiliki Tiongkok untuk mengirimkan komoditas-komoditas Indonesia. Transaksi ekspor tersebut turut mengawal terciptanya peningkatan kerjasama ekonomi diantara keduanya. Atas hal itu salah satu faktor yang membuat Tiongkok berinvestasi ke Indonesia adalah berdasarkan reaksi timbal balik keberlangsungan ekspor Indonesia ke Tiongkok, hal itu terjadi karena investor-investor Tiongkok melihat Indonesia memiliki faktor produksi hingga sumber daya yang bernilai terkait ekspor, hingga akhirnya berinvestasi ke Indonesia. Ditambah para investor asal Tiongkok yakin untuk melakukan investasi ke Indonesia

karena sudah berpengalaman di bidang ekspor yang dilihat dari meningkatnya nilai ekspor Indonesia untuk Tiongkok.

Pertemuan integrasi multilateral dengan nilai ekspor mempengaruhi peningkatan dari FDI yang diterima Indonesia melalui Tiongkok. Bertemunya Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping dalam pembahasan terkait investasi dan perdagangan yang dilakukan secara bilateral disela-sela pertemuan multilateral, hingga nilai ekspor Indonesia terhadap Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2020 yang selalu mengalami peningkatan memberikan tren positif terhadap nilai realisasi investasi dan total proyek investasi yang terus naik dari tahun 2018 hingga akhir 2020.

### **Kesimpulan:**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh skema integrasi multilateral dan nilai ekspor terhadap peningkatan investasi melalui studi kasus Indonesia dengan Tiongkok. Atas penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, pertama arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam pola interaksi dan kerjasama dengan negara lain dipengaruhi oleh kerangka pemikiran dan sudut pandang Presiden Joko Widodo dalam melihat hubungan tersebut, hal itu melalui konsep determinan kebijakan luar negeri oleh Rourke (1986) yang menunjukkan bawah individu pemimpin negara melatarbelakangi terbentuknya kebijakan luar negeri. Sifat lebih menyukai kerjasama bilateral dibanding forum multilateral seakan memproyeksikan penggunaan paham Brendan Taylor secara pasti, dimana forum multilateral menjadi fasilitator dan dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan bilateral. Hal itu juga dibuktikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Direktur Eksekutif CSIS Rizal Sukma yang mengatakan bahwa orientasi kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo lebih mengarah pada bilateral, sedangkan pertemuan tersebut dapat ditempuh melalui forum multilateral karena mempunyai keterkaitan. Kedua integrasi multilateral secara aktual dapat memfasilitasi terlaksananya pertemuan bilateral, hal tersebut dapat terjadi karena pertemuan dilakukan disela-sela forum multilateral dan dilaksanakan di tempat dan waktu yang sama selama forum tersebut berlangsung. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping selama KTT APEC di Port Moresby, Papua Nugini dan KTT G20 di Osaka, Jepang berlangsung. Ketiga naiknya nilai ekspor yang dilakukan Indonesia turut dipengaruhi oleh pertemuan-pertemuan dengan skema integrasi multilateral yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Xi Jinping. Pada pertemuan tersebut selain mengawal dan mendorong peningkatan investasi ke Indonesia, Joko Widodo juga membahas terkait ekspor yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok seperti pada KTT APEC yang mendorong ekspor komoditas buah tropis, minyak dan gas, dan pada

KTT G20 yang mendorong komoditas *crude palm oil*, batu bara, dan komoditas lainnya. Atas dasar itu semua terjadi peningkatan terhadap penerimaan FDI Indonesia melalui Tiongkok berdasarkan sudut pandang Presiden Joko Widodo terhadap kerjasama dengan Indonesia, skema multilateral yang memperlihatkan forum tersebut sebagai fasilitator pertemuan bilateral, dan nilai ekspor yang berbanding lurus dengan nilai realisasi investasi dan total proyek investasi Indonesia oleh Tiongkok.

## Referensi:

- Sunardi, L. (2015, September 16). *INVESTASI INDONESIA : Jokowi Desak Kementerian Bikin Terobosan untuk Permudah Investasi*. Retrieved from SOLOPOS: <https://www.solopos.com/investasi-indonesia-jokowi-desak-kementerian-bikin-terobosan-untuk-permudah-investasi-643299>
- Adyatama, E. (2020, Februari 20). *Genjot Pertumbuhan, Jokowi Sebut Investasi Satu-satunya Jalan*. Retrieved from Tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/1310059/genjot-pertumbuhan-jokowi-sebut-investasi-satu-satunya-jalan>
- OECD. (1996). *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment*. OECD.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia / Kemlu. (2019, March 1). *Kerja Sama Eksternal Asean Mitra Wicara Organisasi Internasional Asean | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved July 13, 2022, from Kementerian Luar Negeri: [https://kemlu.go.id/portal/i/read/15/halaman\\_list\\_lainnya/kerja-sama-eksternal-asean-mitra-wicara-organisasi-internasional-asean](https://kemlu.go.id/portal/i/read/15/halaman_list_lainnya/kerja-sama-eksternal-asean-mitra-wicara-organisasi-internasional-asean)
- Irewati, A., & Kartini, I. (Eds.). (2019). *Potret politik luar negeri Indonesia di era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kemlu. (2020, November 30). *Presiden Joko Widodo: Kerja Sama Multilateral dan Peningkatan Daya Saing Indonesia untuk Investasi Asing Merupakan Hal yang Penting*. Retrieved from Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1928/berita/presiden-joko-widodo-kerja-sama-multilateral-dan-peningkatan-daya-saing-indonesia-untuk-investasi-asing-merupakan-hal-yang-penting>
- Coughlin, C. C., Terza, J. V., & Arromdee, V. (1991). State Characteristics and the Location of Foreign Direct Investment within the United States. *The Review of Economics and Statistics Vol. 73, No. 4*.
- Oman, C. (2000). *Policy Competition for Foreign Direct Investment: A Study of Competition among Governments to Attract FDI*. Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Cubel, A., & Sanchis, M. T. (2003). Investment and growth in Europe during the Golden Age. *European Review of Economic*.

- Bartels, F. L. (2009). FDI Policy Instruments: Advantages and Disadvantages. *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Research and Statistics Branch Working Paper*, 21-22.
- Taylor, B. (2013). *Bilateralism, Multilateralism and Asia-Pacific Security: Contending cooperation*. Routledge.
- Akbar, R. J., & Rahmat, A. (2017, April 26). *Jokowi Minta BUMN Jual Aset untuk Biayai Infrastruktur*. Retrieved from Portal Berita Viva:  
<https://www.viva.co.id/arsip/909171-jokowi-minta-bumn-jual-aset-untuk-biayai-infrastruktur>
- Putri, S. Y., & Ma'arif, D. (2019). Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Kajian LEMHANAS RI, Edisi 37*.
- Najih, M. W. (2019). Hubungan Foreign Direct Investment (FDI) dan Ekspor: Studi Kasus Peran Indeks Ease Of Doing Business (EODB) Di ASEAN-5.
- Setkab. (2018, November 17). *Presiden Jokowi Bahas Perdagangan Hingga Ekonomi Digital dengan Presiden Xi Jinping*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia:  
<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-bahas-perdagangan-hingga-ekonomi-digital-dengan-presiden-xi-jinping/>
- Setkab. (2019, Juni 29). *Hari Ini, Presiden Jokowi Lanjutkan Agenda KTT G-20 dan Gelar Pertemuan Bilateral*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia:  
<https://setkab.go.id/hari-ini-presiden-jokowi-lanjutkan-agenda-ktt-g-20-dan-gelar-pertemuan-bilateral/>
- BPKP. (2017, April 28). *Musrenbangnas 2017, Jokowi Harapkan Sistem Nasional Terintegrasi*. Retrieved from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:  
<https://www.bpkp.go.id/berita/read/17911/5/Musrenbangnas-2017-Jokowi-Harapkan-Sistem-Nasional-Terintegrasi.bpkp>
- Setneg. (2015, April 14). *Hubungan Indonesia-Tiongkok: dari Soekarno hingga Jokowi*. Retrieved from Website Resmi Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara RI:  
<https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=news&id=790>
- Ihsanuddin. (2019, Juni 29). *Presiden Jokowi Berharap Pertemuan AS-China Hasilkan Terobosan Signifikan*. Retrieved from Kompas Nasional:  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/29/06205911/presiden-jokowi-berharap-pertemuan-as-china-hasilkan-terobosan-signifikan>
- Setkab. (2020, September 1). *Presiden Jokowi Apresiasi 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok*. Retrieved from Website Resmi Sekretariat Kabinet Republik



Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-apresiasi-70-tahun-hubungan-bilateral-indonesia-tiongkok/>

Parameswaran, P. (2014, Desember 18). *Is Indonesia Turning Away From ASEAN Under Jokowi? (Early signs point to a far more bilateral, domestic-oriented foreign policy)*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-jokowi/>

Rourke, J. T. (1986). *International Politics On The World Stage*. Brooks and Cole.